





## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** 

: YUDIKATIF

LEMBAGA

: MAHKAMAH AGUNG

**UNIT KERJA** 

: PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama

: RIKE SIMBALLAGO

2. Jabatan

: PANITERA PENGGANTI

3. NHK

: 443403

## II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

900.000.000

1. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** 

Rp.

214.000.000

MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI

2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS / AGYA Tahun 2013, LAINNYA Rp. 50.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, LAINNYA Rp. 5.000.000

MOBIL, TOYOTA/AGYA MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

5. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	25.000.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	15.000.000
F. HARTA LAINNYA		Rp.	<u> </u>
Sub Total		Rp.	1.154.000.000
III. HUTANG		Rp.	220.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	934.000.000

## Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.